

Implementasi Pendidikan Inklusi di SDN Haurngombang II

Lusi Amalida¹, Nenden Ineu Herawati,²

¹Pendidikan Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia

²Pendidikan Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia

lusiamalida@upi.edu

nendenineuherawati@upi.edu

Abstract

Inclusive education has an important role in realizing equality, participation and respect for diversity in the educational environment. Although its implementation is still faced with various challenges and obstacles. This research aims to determine the implementation of inclusive education at SDN Haurngombang II. The type and approach in this research uses qualitative case studies. Research respondents were school principals and teachers. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. Data analysis was carried out using data triangulation analysis techniques. Based on the research results, the problems that arise regarding the implementation of inclusive education programs are the relationship between teachers, students, parents, schools, communities, government and the lack of infrastructure that supports the implementation of inclusive school programs. This is also due to a lack of cooperation from various parties. Teachers are the main factor in the inclusive education process, but without assistance from other parties the implementation of inclusive schools cannot run optimally, so apart from the teachers being handled, it is also necessary to foster an inclusive school culture both within the school itself and in communities outside the school, besides that Government policy also greatly determines the implementation of inclusive schools. In implementing inclusive schools, there needs to be preparation of supporting services and infrastructure as well as support from the government so that the implementation of inclusive education programs in elementary schools can be implemented well.

Article History:

Received: 2023-12-29

Reviewed: 2023-01-05

Published: 2024-03-31

Keywords:

Inclusive education,
elementary school

Abstrak

Pendidikan inklusif memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan, partisipasi, dan penghargaan terhadap keragaman di lingkungan pendidikan. Meskipun implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pendidikan inklusif di SDN Haurngombang II. Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif studi kasus. Responden penelitian yaitu kepala sekolah dan guru. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknis analisis triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian permasalahan yang muncul terkait implementasi program pendidikan inklusi adalah

Sejarah Artikel:

Diterima: 2023-12-29

Direview: 2023-01-05

Disetujui: 2023-03-31

Kata Kunci:

Pendidikan inklusi,
sekolah dasar

kaitannya guru, siswa, orangtua, sekolah, masyarakat, pemerintah dan masih kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program sekolah inklusi. Hal ini juga dikarenakan kurang adanya kerjasama dari berbagai pihak. Guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan inklusi, tetapi tanpa adanya bantuan dari pihak lain pelaksanaan sekolah inklusi tidak bisa berjalan dengan maksimal, sehingga selain guru yang ditangani, perlu juga menumbuhkan budaya sekolah inklusi baik didalam sekolah itu sendiri ataupun komunitas diluar sekolah tersebut, selain itu kebijakan pemerintah juga sangat menentukan pelaksanaan sekolah inklusi. Dalam pelaksanaan sekolah inklusi perlu adanya persiapan layanan dan sarana prasarana yang menunjang serta dukungan dari pemerintah sehingga implemtasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar dapat terimplementasi dengan baik.

PENDAHULUAN

Setiap negara memberikan kesempatan yang sama kepada warganya dalam mendapatkan pendidikan dan hal perlu masuk kedalam sistem pendidikan. Strategi yang dilakukan PBB untuk tercapainya “Education For All (EFA)” adalah melalui pelaksanan pendidikan layanan inklusi (Intifadha & Tuasikal, 2017). Kebijakan tersebut telah disepakati pada World Education Forum oleh UNESCO di Dakar, Sinegal Tahun 2000. Banyak negara memiliki berkomitmen Bersama dalam melindungi hak atas pendidikan bagi para penyandang disabilitas sebagai manifestasi akuntabilitas publik pemerintah bagi setiap warga negaranya (Mayya et al., 2019).

Menurut kajian pada Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kemendikbud pada tahun 2018 menggambarkan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang sekolah dasar/luar biasa SD/LB sebesar 84,52%, yang berarti bahwa sebanya 15,48% anak usia sekolah dasar usia antara 7-12 tahun belum mendapatkan akses pendidikan. Berdasarkan data, terdapat banyak anak berkebutuhan khusus (ABK) belum mendapatkan layanan pendidikan, kondisi pada ABK ini tentu secara signifikan mempengaruhi perolehan nilai APM nasioanl. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh UNESCO tahun 2018 menunjukan data statistik

bahwa hanya sebanyak 47,5% penduduk dengan disabilitas di Indonesia yang telah mendapatkan pengalaman bersekolah (Jazuli, 2020).

Penggunaan penyebutan sekolah inklusi sudah diperkenalkan mulai saat hadirnya Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa (Wati, 2014). Dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan/keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Rahmatika et al., 2020).

Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan layanan dan kesempatan kepada semua anak tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus dan anak dengan potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan bersama-sama anak dengan kriteria pada umumnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) telah menegaskan bahwa “setiap warga berhak untuk mendapatkan pendidikan”; pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa

“setiap warga berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi ditengah masyarakat.

Pendidikan inklusif sangatlah penting untuk diterapkan, dengan adanya pendidikan inklusif dapat memberi peluang dan membuka kesempatan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Pendidikan inklusif merupakan sarana belajar yang paling cocok untuk semua anak, hal ini membuat pendidikan inklusif menjadi hal yang menarik karena selain membantu anak yang berkebutuhan khusus juga bisa melatih anak reguler yang berada dalam kelas yang sama dalam hal adaptasi dan sosialisasi sehingga dapat menjadikan wadah yang wajib antar anak untuk bersosialisasi dengan keanekaragaman yang ada selain itu juga dapat memberikan pemahaman kepada anak yang tidak berkebutuhan khusus agar dapat menerima, mengerti, dan memahami antara perbedaan satu dengan yang lainnya dengan kata lain anak didik tersebut diajarkan bagaimana cara bersikap toleransi dan menerima.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan maupun perkembangannya mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental intelektual, sosial dan emosi dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus (Departemen Pendidikan Nasional, 2009). Jika anak berkebutuhan khusus dimasukkan ke sekolah reguler dengan Kurikulum Standar Nasional tanpa adanya layanan pendidikan khusus maka nantinya di kemudian hari anak-anak ini akan mengalami kesulitan dalam menerima

materi pelajaran. Hal ini memunculkan potensi anak untuk tidak naik kelas atau putus sekolah sehingga anak tidak lagi memperoleh kesempatan dalam pendidikan. Kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari pelayanan pendidikan inklusif perlu pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan yang baik. Pelayanan pendidikan inklusif harus dapat menjangkau dan melayani semua siswa tanpa memandang perbedaan. Anak dengan Berkebutuhan Khusus (ABK) seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan fisik, mental kecerdasan atau emosi, perilaku sosial, autis dan yang lainnya wajib mendapatkan perhatian dan pelayanan yang berkualitas bersama siswa lainnya. Proses pembelajaran yang berkualitas akan mampu mengantarkan siswa mencapai ketuntasan dan kompetensi belajarnya serta mengantarkan siswa menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat.

Dalam proses belajar mengajar, peran dan kualitas guru sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang dilaksanakannya. Guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Persoalannya, sekolah inklusif memiliki siswa berkebutuhan khusus dan siswa normal dalam dalam satu kelas yang sama. Keberadaan ABK dan siswa normal dalam satu kelas adalah sebuah persoalan yang harus dipecahkan oleh guru. Guru sangat perlu mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya. Pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat

istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif (Saputra, 2016).

Pendidikan Inklusi masih dipahami sebagai upaya memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler dalam rangka memberikan hak atas pendidikan untuk semua anak, kemudahan akses pendidikan, dan menghilangkan diskriminasi. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai bahan olok-olokan. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing anak berkebutuhan khusus, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif di kelas, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik (Ilahi, 2016).

Sekolah inklusi merupakan bagian dari strategi pemerataan dan perwujudan layanan pendidikan tanpa diskriminasi bagi anak yang berkebutuhan khusus dan anak normal pada umumnya agar mendapatkan pendidikan yang sama. Pelaksanaan program pendidikan inklusi tidak memberikan perlakuan khusus ataupun hak-hak istimewa bagi anak berkebutuhan khusus, kan tetapi memberikan persamaan hak dan kewajiban dengan peserta didik normal pada umumnya (Darma & Rusyidi, 2015). Kerjasama semua pihak mulai dari pemerintah, sekolah dan masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan Pendidikan inklusi, karena layanan Pendidikan ini memberikan tantangan baru untuk sekolah dan masyarakat. Implementasi program sekolah inklusi diharapkan dapat menyiapkan generasi penerus untuk dapat

menerima dan menginterpretasikan bentuk perbedaan serta menghindari diskriminasi dalam kehidupan masyarakat yang beragam (Mardani, Sulistia, 2020). Konsep pada Pendidikan ABK memiliki pemaknaan juga spektrum lebih luas dibandingkan pada konsep spektrum anak luar biasa (*exceptional children*) (Ikramullah, 2020). Pada konsep pendidikan bagi ABK menggunakan layanan yang lebih spesifik dikarenakan memiliki keunikan hambatan belajar dan perkembangan akademik (*barrier to learning and development*), seperti pada penyandang: tunanetra, tunadaksa, tunalaras, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, sehingga pencapaian akselerasi akselerasi mereka berbeda dengan siswa normal dalam belajar hal ini juga berpengaruh pada proses emosi dan kontrol sosial (Abd. Kadir, 2015).

Mencermati fenomena saat ini pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi paling tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus namun kenyataan dalam penyelenggaraan pendidikan inkusif di Indonesia masih ditemukan banyak kendala seperti, manajemen sekolah inklusif masih belum optimal, tenaga kerja yang memiliki kapabilitas dalam mengajar anak berkebutuhan khusus masih dinilai kurang (seperti guru belum mengetahui karakteristik anak berkebutuhan khusus dan metode-metode untuk menanganinya), kurangnya guru pembimbing khusus, belum siapnya sekolah menampung anak berkebutuhan khusus, masih banyaknya siswa dalam kelas, masih adanya intimidasi anak-anak berkebutuhan khusus oleh teman sekelasnya. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian adalah untuk melihat dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada implementasi program pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Haurngombang II.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus (case study), yaitu penelitian tentang individu, kelompok, satu organisasi dalam waktu tertentu (Arifin, 2011). Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Haurngombang II. Penelitian ini berlangsung pada bulan November 2023. Subyek Penelitian adalah Guru SDN Haurngombang II yang berjumlah 18 orang. Penelitian ini akan menganalisis Implementasi Pendidikan inklusif di SDN Haurngombang II.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah dari jurnal dan buku bacaan. Teknik pengumpulan data melalui metode purposive sampling. Dalam penelitian kualitatif, teknik purposive sampling adalah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Tidak ada batasan jumlah responden untuk membuat sampel purposive, asalkan informasi yang diinginkan dapat diperoleh dan dihasilkan (Bernard, 2002). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1992), ada tiga hal utama dalam analisis data model interaktif, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Prosedur penelitian ini yaitu diawali dengan tahap pendahuluan, di mana melakukan

survei terhadap implementasi Pendidikan inklusif di SDN Haurngombang II. Pada tahap pendahuluan juga dilakukan penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan yakni pengumpulan data sebanyak mungkin. Tahap ketiga, yaitu tahap penyelesaian. Pada tahap ini peneliti menganalisis data berdasarkan hasil temuan peneliti dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi..

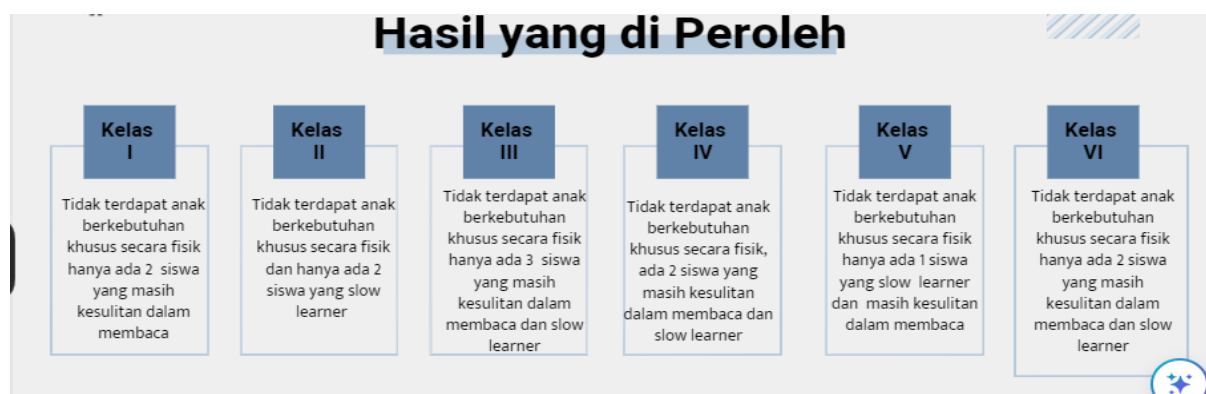
HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Inklusi di SDN Haurngombang II.

SDN haurngombang II beralamat di Dusun Cipareuag RT 02 RW 06 Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. NPSN 20208833. Jumlah pendidik dan tenaga pendidik sebanyak 19 orang. Jumlah peserta didik 437 orang.

A. Peserta Didik.

1. Penerimaan Peserta didik
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dan Guru di SDN Haurngombang II jumlah peserta didik yang termasuk ABK berjumlah 12 orang dengan sebaran sebagai berikut :



2. Proses penerimaan peserta didik dengan kebutuhan khusus dilaksanakan sama dengan peserta didik yang normal dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan, sebagai berikut:
 - a. Tujuan Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
 - b. Asas pelaksanaan PPDB adalah objektif, transparan (terbuka) dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
 - c. Persyaratan Usia
 - 1) Usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - 2) Usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan/atau psikis. dan di buktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - 3) Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon peserta didik baru penyandang disabilitas
3. Identifikasi dan Asesmen Identifikasi penting dilakukan karena hasilnya menentukan proses selanjutnya yaitu kegiatan Asesmen. Kegiatan asesmen adalah memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non akademik (perkembangan) dan kekhususan secara lengkap, akurat dan obyektif. Asesmen berfungsi untuk membantu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Dalam hal ini hasil asesmen dapat difungsikan sebagai kondisi kemampuan awal (baseline) anak sebelum diberikan layanan baik akademik maupun program kebutuhan khusus. Informasi yang diperoleh guru (screening) dapat digunakan untuk mengetahui peserta didik yang diduga sebagai disabilitas/berkebutuhan khusus.
4. Identifikasi dan Asesmen terhadap Peserta didik dengan kebutuhan khusus di SDN Hauengombong Kec. Pamulihan dilaksanakan oleh guru kelas.
5. Kurikulum

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala sekolah dan guru di SDN Haurngombong II Kec. Pamulihan, menerapkan model kurikulum duplikasi dan modifikasi. Model kurikulum duplikasi adalah kurikulum untuk PDBK yang disamakan dengan kurikulum peserta didik reguler, sedangkan kurikulum modifikasi adalah kurikulum reguler yang diubah agar sesuai dengan kemampuan PDBK. Sehingga sekolah memberikan layanan akomodasi yang layak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khusus peserta didik.
6. Pembelajaran SDN Haurngombong II menerapkan prinsip-prinsip dalam akomodasi pembelajaran antara lain memberi peluang kepada PDBK untuk berpotensi pada bidangnya, mengembangkan kecerdasan majemuk, mempertimbangkan multisensori, multimedia dan multisumber, adanya motivasi dan penerimaan guru dan antar peserta didik, mengajar untuk seluruh peserta didik, mengajarkan cara belajar dan

- mempertimbangkan ketahanan belajar peserta didik.
7. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDN Haurngombang II bahwa Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilaksanakan bersamaan dengan anak yang normal, PDBK ditempatkan di paling depan agar guru bisa mengontrol dan memberikan pelayanan yang optimal kepada PDBK, di hari-hari tertentu PDBK juga menerima pelayanan pembelajaran di ruang khusus oleh guru.
 8. Proses pembelajaran yang dilakukan memberikan kesempatan agar peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam kegiatan belajar di kelas bersama dengan teman-temannya. Pendekatan kolaborasi dan kooperatif merupakan strategi yang digunakan oleh guru dalam mengembangkan pemahaman peserta didik menghubungkan konsep yang sedang dipelajari dengan kondisi nyata dalam kehidupan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memahami konsep yang dipelajarinya.
 9. Penilaian dipengaruhi oleh diferensiasi dan modifikasi kurikulum yang digunakan sehingga mengakomodasi kebutuhan belajar setiap peserta didik berkebutuhan khusus yang beragam. KKM dan capaian pembelajaran bagi seluruh peserta didik sama. Namun, indikator pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan karakteristik dan/atau kebutuhan belajarnya.
 10. Penetapan Kenaikan Kelas dan Kelulusan peserta didik berkebutuhan khusus ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan catatan: 1) Capaian minimal ketuntasan pembelajaran dan nilai sikap/perilaku minimal baik, tidak berlaku pada peserta didik berkebutuhan khusus; 2) Kehadiran.
 11. Format rapor bagi peserta didik berkebutuhan khusus menggunakan format rapor yang berlaku di satuan pendidikan sebagaimana yang berlaku bagi peserta didik reguler lainnya. Nilai dan deskripsi dalam rapor bersifat individual, sesuai capaian masing-masing peserta didik. Artinya guru memberikan nilai dan deskripsi capaian kompetensi setiap individu peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan peserta didik.
 12. Ijazah Peserta didik berkebutuhan khusus yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah sebagai tanda kelulusan dan tidak dibedakan antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler. Ketentuan ijazah adalah sebagai berikut: 1) Dikeluarkan oleh kepala satuan pendidikan dimana peserta didik belajar 2) blangko ijazah sama dengan peserta didik lainnya. 3) ijazah dapat digunakan untuk melanjutkan ke satuan pendidikan dan jenjang yang lebih tinggi. 4) kepala satuan pendidikan menyertakan surat keterangan tambahan ijazah yang mencantumkan jenis hambatan peserta didik berkebutuhan khusus.
 13. Sarana Prasarana Berdasarkan hasil observasi di SDN Haurngombang II, belum ada sarana prasarana khusus untuk siswa ABK. Sekolah selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat termasuk orangtua wali siswa yang tergabung dalam Komite Sekolah, termasuk untuk menangani siswa ABK. Namun karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah, terlebih dengan adanya pandangan masyarakat mengenai stigma buruk

yang masih melekat pada ABK dengan masih adanya anggapan anak ABK sering mengganggu pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sehingga orang tua hanya mempercayakan saja semua pada pihak sekolah.

Dari hasil observasi mengenai implementasi Pendidikan inklusi di SDN Haurngombang II, sudah selaras dengan konsep Pendidikan inklusi yang disampaikan dalam teori dan penelitian sebelumnya, Program pendidikan inklusi di sekolah merupakan kebersamaan peserta didik di kelas dalam lingkungan dan layanan pendidikan yang sama, kebersamaan siswa normal dan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah diyakini akan membawa suatu pengaruh positif yang sangat konstruktif dan efektif untuk mengintegrasikan mereka dalam suatu kehidupan sekolah dan kemudian berlanjut di luar sekolah. Kehidupan di lingkungan masyarakat menuntut mereka dapat berbaur serta berinteraksi dengan masyarakat yang sangat beragam Untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat dengan baik maka perlu menyiapkan mereka sejak belajar di sekolah menjadi suatu keharusan. Peserta didik normal maupun anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama, meskipun dengan hambatan dan perbedaan kemampuan yang mereka miliki (Kadir, 2015).

Siswa yang tidak terbiasa bergaul dalam keragaman majemuk di sekolah akan menjadi sulit bergaul dengan lingkungan masyarakat. Kebersamaan siswa di sekolah inklusi ditujukan pula untuk mereduksi kesenjangan agar mereka terbiasa hidup dalam keragaman, sehingga mereka saling mengenal, mengetahui, dan memahami tentang keberadaan setiap individu. Anak berkebutuhan khusus dapat

memperoleh pembelajaran dalam hubungannya dengan peserta didik normal, demikian sebaliknya, bahwa peserta didik normal dapat belajar bagaimana mengembangkan sikap untuk bisa menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus (Junanto & Kusna, 2018). Interaksi antar siswa sebenarnya tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi pengenalan mereka di sekolah akan berlanjut pada interaksi mereka di luar sekolah dalam bentuk komunikasi, silaturahmi antar siswa, dan terkadang melibatkan orang tua serta keluarga, sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Hal ini dapat menjadi jalan bagi peserta didik normal maupun anak berkebutuhan khusus bahwa sekolah inklusi dapat menjadi model terapi dalam mengurangi kesenjangan kehidupan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Model pendampingan yang dilakukan di sekolah inklusi pada jam belajar atau jam khusus konseling peserta didik dapat menjadi kesempatan upaya pengobatan atau terapi bagi siswa (Dewi, 2017).

Pendidikan inklusi merupakan solusi bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk tidak mengalami tekanan psikologis karena keadaan yang menimpa dirinya. Mengangkat harkat dan martabat anak berkebutuhan khusus, merasa diterima dan tidak terpinggirkan dengan keadaan yang menimpa dirinya akan dapat mendorong aktivitas siswa lebih aktif serta dapat mengembangkan kreativitasnya. Lembaga pendidikan yang dapat merangkul dan menerima keragaman seharusnya melakukan reorientasi kurikulum, infrastruktur, maupun sistem pembelajaran yang kompatibel dengan kebutuhan individu peserta didik yang beragam (Kadir, 2015).

Konsep education for all (pendidikan untuk semua)

mengisyaratkan perlunya sekolah serta lembaga pendidikan mempersiapkan pendidik yang memiliki kompetensi dan pemahaman serta mampu mendidik dan mengajar setiap individu sebagai akibat bahwa human differences dan learning styles differences dianggap sebagai sesuatu yang alamiah dan normal (Wati, 2014).

Implementasi kebijakan sekolah inklusi di sekolah dasar perlu ditinjau secara menyeluruh agar diketahui apakah pendidikan inklusi yang telah diterapkan sudah berjalan dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pendidikan inklusi merupakan aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan pengguna serta dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, dapat ditegaskan bahwa dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan yang dirancang dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasi penerapannya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya dapat dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri (Nurwan, 2019).

Implementasi pada Program Pendidikan dapat dikaji berdasarkan dua variabel menurut Merilee S. Grindle, dua variabel tersebut adalah variabel Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Hasil penelitian ditemukannya masalah dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusi, akan tetapi permasalahan tersebut tidak menghambat

jalannya proses implementasi program pendidikan inklusi di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan inklusi telah berjalan dengan baik sesuai dengan target sasaran yang hendak dicapai atas kerjasama kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat (Sudarto, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian (Tarnoto, 2016) permasalahan yang muncul terkait implementasi program pendidikan inklusi adalah kaitannya guru, siswa, orangtua, sekolah, masyarakat, pemerintah dan masih kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program sekolah inklusi. Hal ini juga dikarenakan kurang adanya kerjasama dari berbagai pihak. Guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan inklusi, tetapi tanpa adanya bantuan dari pihak lain pelaksanaan sekolah inklusi tidak bisa berjalan dengan maksimal, sehingga selain guru yang ditangani, perlu juga menumbuhkan budaya sekolah inklusi baik didalam sekolah itu sendiri ataupun komunitas diluar sekolah tersebut, selain itu kebijakan pemerintah juga sangat menentukan pelaksanaan sekolah inklusi. Dalam pelaksanaan sekolah inklusi perlu adanya persiapan layanan dan sarana prasarana yang menunjang serta dukungan dari pemerintah sehingga implementasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar dapat terimplementasi dengan baik (Muazza et al., 2018).

Faktor Pendukung Implementasi Pendidikan Inklusi Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui faktor pendukung dari implementasi program pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Haurngombang Kec. Pamulihan adanya kerjasama antara kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat untuk mendukung berjalannya program pendidikan inklusi. Kerjasama tersebut tercermin dalam kebijakan sekolah yang mendorong pelaksanaan program

pendidikan inklusi yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Faktor pendukung tersebut menjadi keuntungan bagi sekolah dan lingkungan masyarakat serta siswa dalam berinteraksi, bersosialisasi dan toleran terhadap perbedaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Inklusi Selain faktor pendukung dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi tentunya ada faktor penghambat yang menjadi sebuah tantangan bagi kepala sekolah dan guru, masih ada paradigma pandangan masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus sulit untuk ditangani, sehingga menimbulkan adanya komplain dari beberapa orang tua murid yang keberatan anaknya disatu kelaskan dengan anak berkebutuhan khusus. Faktor penghambat lainnya masih kurangnya pengetahuan penanganan anak berkebutuhan khusus. Pada umumnya guru di sekolah dasar berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, sehingga memiliki keterbatasan informasi mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus secara spesifik. Selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi adalah kurikulum yang belum berreorientasi disusun untuk program sekolah inklusi, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi pendidik. Disamping itu sarana pendukung di sekolah belum cukup memadai untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus.

Upaya Kepala Sekolah dan Guru dalam Implementasi Pendidikan Inklusi Lembaga sekolah dan dinas pendidikan terus berupaya melakukan perbaikan dan mencari solusi untuk menangani hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pendidikan inklusi. Upaya yang sudah dilakukan diantaranya: 1) Sosialisasi yang dilakukan bersama komite sekolah sebagai upaya memberikan pemahaman dan

peningkatan kesadaran pada seluruh orang tua murid di sekolah dasar tersebut; 2) Pelatihan dan workshop mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus terus dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu layanan pada implementasi program pendidikan inklusi dan sebagai peningkatan kompetensi guru; 3) Pihak sekolah bekerjasama dengan dinas pendidikan mengadakan pelatihan pengembangan model kurikulum dalam upaya reorientasi kurikulum bagi sekolah inklusi; 4) Sekolah terus berupaya melengkapi sarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada sekolah inklusi, dengan bekerjasama dinas pendidikan melalui pemerolehan bantuan dari pemerintah pusat untuk pemenuhan fasilitas pada sekolah inklusi. Berdasarkan temuan penelitian dilihat dari faktor pendukung, faktor penghambat dan upaya sekolah dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusi di sekolah dasar. Implementasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar masih perlu diteliti lebih lanjut. Sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya agar program tersebut dapat terimplementasi dengan baik sesuai rancangan program dari pemerintah. Dalam penelitian ini masih terbatas pada implementasi program Pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Haurngombang II Kec. Pamulihan untuk mendapatkan data dari berbagai sudut pandang mengenai implementasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar tentunya masih banyak hal yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut.

SIMPULAN

Pendidikan inklusif memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan, partisipasi, dan penghargaan terhadap keragaman di lingkungan pendidikan. Meskipun implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, upaya pemerintah dan stakeholder

terkait telah menghasilkan kebijakan, program, dan model praktik terbaik dalam pendidikan inklusif. Salah satu aspek kunci dalam implementasi pendidikan inklusif adalah peran guru. Guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memadukan keterampilan pedagogis dengan diferensiasi, dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dukungan yang diperlukan, seperti pelatihan tambahan dan pengembangan kapasitas guru, harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusif. Dampak positif pendidikan inklusif juga telah terbukti, baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus maupun bagi peserta didik tanpa kebutuhan khusus. Partisipasi yang lebih luas, perkembangan sosial-emosional yang positif, dan penghargaan terhadap keragaman adalah beberapa dari banyak manfaat yang dihasilkan dari pendidikan inklusif. Namun, evaluasi yang berkelanjutan dan strategi peningkatan terus diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi dan keberlanjutan program-program pendidikan inklusif di Indonesia.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat secara keseluruhan untuk terus bekerja sama dan berkomitmen untuk mendorong implementasi pendidikan inklusif yang lebih baik. Dalam mewujudkan visi inklusi pendidikan, dibutuhkan upaya kolaboratif yang melibatkan semua pihak yang terlibat, peningkatan sumber daya, perbaikan kebijakan, dan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya pendidikan inklusif bagi semua peserta didik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendidikan inklusif dapat menjadi realitas yang semakin berhasil di Indonesia, memastikan kesetaraan dan aksesibilitas pendidikan bagi semua individu tanpa memandang keberadaan kebutuhan khusus.

DAFTAR RUJUKAN

- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 147–300
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Model pembelajaran dan pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: Pedoman Umum Penyelenggaraab Pendidikan Inklusif.
- Dewi, N. (2017). Manfaat program pendidikan inklusi untuk aud. In *journal.uny.ac.id*.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/15657>
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Model pembelajaran dan pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: Pedoman Umum Penyelenggaraab Pendidikan Inklusif.
- Ikramullah, A. S. (2020). Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131–139.
<https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i2.36>
- Ilahi, M. T. (2016). Pendidikan Inklusif. *Ar-Ruzz Media*
- Jazuli, M. K. (2020). Implementasi Kurikulum Pendidikan Inklusi di Sd Negeri Gejayan. *E-Jurnal Skripsi Program Studi Teknologi Pendidikan*, 9(5), 497–506.
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/fiftp/article/view/17543>
- Junanto, S., & Kusna, N. A. A. (2018). Evaluasi Program Pembelajaran di

- PAUD Inklusi dengan Model Context, Input, Process, and Product (CIPP). INKLUSI, 5(2), 179. <https://doi.org/10.14421/ijds.050202>
- Kadir, A. (2015). PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA Abd. Kadir (Dosen PAI FTK UIN Sunan Ampel Surabaya). Pendidikan Agama Islam, 03, 1–22.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, (2011). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif .Surabaya : Direktorat PPK-LK
- Mardani, Sulistia, H. B. (2020). Identifikasi Hambatan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Inklusi SD Negeri 131/IV Kota Jambi. Universitas Jambi, 1–9. <https://repository.unja.ac.id/13961/>
- Mayya, Sa'ud, U. S., & Meirawan, D. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar. Jurnal Administrasi Pendidikan, 26(1), 108–117. <https://doi.org/10.17509/jap.v26i1.19853>
- Muazza, M., Hadiyanto, H., Heny, D., Mukminin, A., Habibi, A., & Sofwan, M. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi Studi Kasus Di Sekolah Dasar Jambi. Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran, 2(1), 1–12.
- Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. JESS (Journal of Education on Social Science), 3(2), 201. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>
- O'Neil, J.(1994/1995).Can inclusion work? A Conversation With James Kauffman and Mara Sapon-Shevin. Educational Leadership.52(4)7-11
- Rahmatika, N., Ratrianasari, D., & Widodo, H. (2020). Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Inklusi Sekolah Dasar International Islamic School (Intis) Yogyakarta. EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar, 12(1), 55–61. <https://doi.org/10.17509/eh.v12i1.18596>
- Saputra, A. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, 1(3), 3.
- Sudarto, Z. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF Zaini Sudarto Prodi Pendidikan Luar Biasa FIP Unesa Abstrak. Jurnal Pendidikan, 1, 89–97.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat Sd. Humanitas, 13(1), 50. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v13i1.3843>
- Wati, E. (2014). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Didaktika, 14(2), 368–378. <https://doi.org/10.22373/jid.v14i2.508>